



PERAN PEMERINTAH DALAM REALISASI RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN FRONTAGE WARU-BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Cindy Aprilia Palupi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi, cindyapriiap09@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

The role of the government in the RPJMD of Sidoarjo Regency is a medium-term planning document of Sidoarjo Regency for a period of 5 years which is prepared to provide a reference or direction for all development actors in the Sidoarjo Regency area in implementing governance and development management. One of the RPJMDs of Sidoarjo Regency is the plan to build the Waru-Buduran frontage road. The purpose of this paper is to provide understanding and information related to the government's role in the realization of the Sidoarjo Regency medium-term development plan, the development process of the Waru-Buduran frontage road. The writing of this journal article was carried out with a qualitative research approach with descriptive analysis. The type of data used in writing this journal article is secondary data in the form of theoretical books, theses, journals, and related articles. For data sources, the authors use data sources through research journals and theoretical books related to the topic of discussion raised by the author. The result of this research is that the Sidoarjo Regency Government has begun to resume the process of building the frontage road by solving various obstacles, one of which is land acquisition. With this, the development process will be realized even though it is delayed from the target for completion of construction. This shows that the realization of the frontage road construction will be successful even though it is slightly delayed.

Keywords: government role, development, infrastructure.

Abstrak

Peran pemerintah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 tahun yang disusun untuk memberikan acuan atau arahan bagi seluruh pelaku pembangunan di daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Salah satu RPJMD Kabupaten Sidoarjo adalah rencana pembangunan frontage road Waru-Buduran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait adanya peran pemerintah dalam realisasi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo, proses pembangunan frontage road Waru-Buduran. penulisan jurnal artikel ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan jurnal artikel ini adalah jenis data sekunder berupa buku teori, skripsi, jurnal, dan artikel terkait. Untuk sumber data, penulis menggunakan sumber data melalui jurnal-jurnal penelitian dan buku teori terkait dengan topik bahasan yang diangkat oleh penulis. Hasil dari penelitian ini adalah Pemkab Sidoarjo mulai melanjutkan kembali proses pembangunan jalan frontage dengan cara menyelesaikan berbagai hambatan salah satunya pembebasan lahan. Dengan hal ini proses pembangunan akan terealisasi meskipun molor dari target selesainya pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pembangunan frontage road akan berhasil meskipun sedikit molor.

Kata Kunci: peran pemerintah, pembangunan, infrastruktur.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang modern, Indonesia dituntut untuk meningkatkan kemajuan di era globalisasi saat ini, terlebih pada sektor pembangunan baik di daerah maupun di tingkat nasional, artinya pembangunan daerah mengalami peningkatan yang akan mewujudkan peningkatan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pentingnya otonomi daerah untuk memberikan kesempatan bagi setiap daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan daerahnya masing-masing. Makna otonomi daerah sendiri adalah kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai potensi dan ciri khas daerah masing-masing [1]. Dengan demikian pemerintahan daerah bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing dengan baik untuk menunjang peningkatan pembangunan daerah.

Diperlukan suatu perencanaan yang baik dalam mewujudkan peningkatan pembangunan agar pembangunan lebih terstruktur dan merata. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, tatacara evaluasi dan evaluasi pembangunan daerah, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan, “Dokumen perencanaan daerah selama menjabat terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya jabatan Kepala Daerah biasanya periode 5 tahun disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)” [2]. Salah satu RPJMD untuk mewujudkan peningkatan pembangunan adalah RPJMD Kabupaten Sidoarjo. RPJMD Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 tahun yang disusun untuk membarikan acuan atau arahan bagi seluruh pelaku pembangunan di daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan beberapa kota lain yang berada di Jawa Timur, salah satunya Surabaya. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya. Daerah Surabaya yang sudah padat menyebabkan perkembangan kota mengarah ke Sidoarjo, sehingga banyak orang berbondong-bondong ke Sidoarjo untuk mendirikan rumah, membangun usaha ataupun mencari pekerjaan. Jumlah penduduk yang padat dan meningkat dari setiap tahunnya.

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
2018	2.238.069
2019	2.266.533
2020	2.033.764
2021	2.064.168

Sumber: BPS, diolah [3]

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan karna dampak akibat pandemic covid 19 yang menyebabkan banyak penduduk yang meninggal dunia, namun pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mulai mengalami peningkatan sekitar 300 orang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut berpengaruh pada jumlah kendaraan yang meningkat.

Tabel 2 Data Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR
2018	1.636.032
2019	1.750.445
2020	1.808.754

Sumber: BPS, Diolah [4]

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Sidoarjo Dengan adanya banyaknya kendaraan yang semakin meningkat menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo. Kurangnya kapasitas jalan juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan karena kapasitas jalan tidak mampu menampung volume dari kendaraan yang melintas di jalan raya. Solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut ialah memperluas kapasitas jalan untuk bisa menampung volume kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat. Salah satu rencana Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo jangka menengah adalah pembuatan jalan frontage road Waru-Buduran. Dengan adanya rencana pembangunan frontage road Waru-Buduran bisa mengurangi volume kemacetan di sepanjang jalan raya Sidoarjo, akan tetapi pembangunan tersebut lama yang berakibat jalan raya di sekitar Sidoarjo mengalami kemacetan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, banyak permasalahan yang muncul dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah salah satunya pada pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya realisasi pembangunan infrastruktur jalan frontage road Waru-Buduran akan memberikan solusi dalam permasalahan kemacetan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini akan membahas beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan frontage Waru-Buduran?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui proses pembangunan infrastruktur jalan frontage Waru-Buduran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah

Peran memiliki makna perilaku atau tindakan. Sedangkan peranan memiliki arti fungsi, kedudukan [5]. Pemerintah daerah memiliki yang arti yang luas yakni penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga kekuasaan daerah yang terdiri dari DPRD dan Kepala Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peran pemerintah daerah yaitu:

- a) Pemerintah mengatur dan mnegurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi
- b) Mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menjalankan otonomi daerah.
- c) Menyelenggarakan hubungan antar pemerintah pusat [6].

2.2. Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan dengan sengaja yang ditempuh oleh suatu negara menuju negara

yang modern. Menurut Todaro, bahwa “pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup struktur social, sikap rakyat, dan lembaga nasional, pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan absolut” [5]. Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang menyeluruh dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan kemajuan sosial dan material terhadap lingkungan masyarakat. Adapun pembangunan sarana fisik yang memiliki manfaat bagi masyarakat, antara lain:

- a) Jalan dan jembatan sebagai prasarana pembangunan infrastruktur jalan
- b) Pasar sebagai prasarana pemasaran
- c) Gedung sekolah, puskesmas sebagai prasarana sosial
- d) Saluran air sebagai prasarana produksi

2.3. Infrastruktur

Kata infrastruktur tercantum dalam Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia infrastruktur diartikan sebagai “sarana”. Infrastruktur ialah suatu rangkaian yang terdiri dari adanya bangunan fisik yang saling mengikat dan saling bergantung satu sama lain. Misalnya jaringan jalan. pembangunan infrastruktur didasarkan atas sebuah ide yang memiliki makna dan tujuan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat diukur dari pemanfaatan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat [7]. infrastruktur ialah fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, transportasi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur jalan sangat menunjang perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan memudahkan meningkatkan arus mobilitas barang dan jasa [8].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Model penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif untuk menghasilkan hasil deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan keadaan apa yang sedang terjadi. Ada upaya untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, menafsirkan, dan mengkarakterisasi keadaan yang ada atau yang muncul.

Studi ini didasarkan pada tinjauan literatur. Studi literatur juga dapat dikaitkan faktor yang memiliki peran untuk kegiatan penelitian, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari studi literatur ilmiah. Dengan meneliti bahan pustaka, seperti yang berkaitan dengan masalah pembahasan, penelitian kepustakaan digunakan untuk menambah data dan informasi [9]. Prosedur terkait dikenal sebagai studi literatur, dan mereka memerlukan pencarian sumber literatur yang menggabungkan teori-teori yang ditemukan dalam publikasi ilmiah yang diterbitkan atau tidak diterbitkan yang terkandung dalam media elektronik. (ebook), tesis, dan e-journal adalah contoh publikasi elektronik.[10]

Menurut [11] Ia berpendapat bahwa titik penelitian adalah topik yang menjadi pembahasan penting dalam mempelajari suatu ilmu, sedangkan lokus adalah tempat atau lokasi yang menjelaskan di mana letak ilmu itu, dalam bukunya yang menyampaikan konsep Locus & Fokus Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami peran pemerintah dalam realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui hambatan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan frontage Waru-Buduran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Pemerintah Dalam Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam memutuskan pembangunan apa saja yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 sebagai berikut [5]:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah konsep rancangan yang disusun secara sistematis oleh badan khusus tertentu untuk tercapainya suatu tujuan. Perencanaan adalah suatu penetapan, kapan, bagaimana dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Perencanaan merupakan sebuah rencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yakni membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan di daerah Kabupaten Sidoarjo.

2) Pelaksanaan

Setelah dilakukan perencanaan, maka tahap selanjutnya yakni pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. pemerintah dikatakan berhasil jika apa yang sudah direncanakan dalam perencanaan berhasil dicapai. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, dalam proses pelaksanaan ada yang dikerjakan tetapi belum selesai dengan tepat target penyelesaian.

3) Pengawasan

Pada proses pengawasan ini adalah proses dimana untuk menghindari kecurangan dalam mengeluarkan anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal melalui anggaran pemerintah. Proses pengawasan juga bagian dari penilaian hasil akhir dan evaluasi mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang sudah dilaksanakan.

Pemerintah Daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum. RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan RKPD yang di dalamnya berisi tentang prioritas pembangunan daerah, rancangan dan rencana serta program pemerintahan yang bersifat indikatif [12].

Pada tanggal 09 Desember 2020 Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada). Berdasarkan hasil pilkada tersebut, ditetapkan pasangan H. Ahmad Muhdlor Ali, S.IP dan H. Subandi, S.H. dengan terpilihnya tersebut Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun dan menetapkan RPJMD dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) paling lama 6 bulan setelah dilantik. Sasaran pokok pembangunan dalam periode mengacu pada sasaran pokok kebijakan dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk yang cukup tinggi menyebabkan pemerintahan daerah harus memperhatikan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Sidoarjo yang baik. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat banyak juga masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya pada pengguna jalan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan raya di daerah Kabupaten Sidoarjo. Volume jalan yang minim yang tidak bisa menampung banyaknya transportasi yang melintas membuat kemacetan semakin padat. Kemacetan yang hampir terjadi setiap hari, kemacetan biasanya dimulai dari titik terakhir frontage Surabaya jalanan yang belum tersambung dengan frontage Sidoarjo yakni pertigaan Stasiun Waru, Kemudian merambat macet di Bundaran Aloha, Perempatan Gedangan, dan Perempatan Seruni. Salah satu rencana dari Pemerintah Daerah mengenai hal tersebut adalah

perluasan jalan dengan membangun frontage road. Rencana pembangunan frontage road ini sempat dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya akan tetapi berhenti dan akan di lanjutkan kembali pada pemerintahan daerah yang saat ini telah terpilih.

4.2 Pembangunan Infrastruktur Frontage Road Waru-Buduran

Pembangunan jalan frontage Waru-Buduran dilanjutkan kembali dan menjadi prioritas Pemkab Sidoarjo. Pada saat mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati, Gus Muhdlor-Subandi berjanji untuk menuntaskan pembangunan frontage road. Sehingga, pembangunan yang sudah lama berjalan dan tak kunjung tuntas selama 5 tahun itu menjadi PR yang utama bagi Gus Muhdlor-Subandi. Kendala yang membuat proses pembangunan jalan frontage Waru-Buduran sangat lama yang membuat masyarakat geram kini di tuntaskan oleh Gus Muhdlor-Subandi.

Menindaklanjuti keseriusan Gus Muhdlor-Subandi bangunan warga dari 8 desa sebanyak 148 bangunan yang berada di 3 kecamatan. Yakni Desa Kedungrejo dan Desa Waru yang berada di Kecamatan Waru seta Desa Sawotatap, Desa Gedangan, Desa Sruni, Desa Tebel yang berada di Kecamatan Gedangan dan Desa Banjarkemantren, Desa Buduran yang berada di Kecamatan Budurann. Bupati memberika kelonggaran waktu selama 30 hari untuk merobohkan bangunannya sendiri, jika tidak Pemkab Sidoarjo akan menrunkan alat berat untuk merobahkan bangunan tersebut [13]. Dengan proses yang dilakukan oleh Gus Muhdlor-Subandi sudah terlihat pembangunan frontage road ada progress signifikan dari awal pembangunan ada kendala yang tidak secepatnya ditindak lanjuti sehingga pembangunan terhenti sampai akhirnya Gus Muhdlor menyelesaikan semua kendala termasuk pembebasan lahan, kemungkinan pembebasan lahan akan terealisasi pada bulan Oktober dan pembangunan jalan Frontage mulai proses pembangunan lagi pada Oktober tahun 2021. Pada tahun 2022 sekitar 3,1 km pembangunan frontage road akan mulai proses pembangunan pada bulan Juli.

Progress pembangunan frontage road saat ini sampai pada tahap pelelangan dan Dinas PU Bina Marga SDA akan melalukan perjanjian kontrak dengan pihak lain atau pihak ketiga pada akhir bulan Juni. Untuk progres jalan frontage yang dari Lingkar Timur PT. Maspion II hingga Aloha hingga sudah bisa digunakan dan dilalui oleh pengendara yang melintas dan akan dibuka pada tahun 2023. Dengan dibukanya jalan frontage akan mengurangi tingkat kemacetan dari arah Surabaya ke Sidoarjo. Sedangkan untuk progres pembangunan frontage road dari arah Waru yakni mulai dari Pabrik Paku sampai Aloha akan disebut pembangunannya pada tahun 2023. Untuk mempercepat proses pembangunannya, Dinas PU Bina Marga SDA akan melakukan proses pembebasan lahan di tahun 2022. Proyek frontage road sejatinya ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021 karena sesuai dengan RPJMD Sidoarjo 2016-2021. Namun, karena beberapa kendala yang belum tuntas, maka pembangunannya pun molor hingga tahun 2022, semoga pembangunan lanjutan ini segera terealisasikan dan tuntas. Masyarakat Sidoarjo sangat mengidam-idamkan pembangunan jalan frontage hal ini dikarenakan bisa mengurangi kemacetan yang terjadi hampir setiap hari di sepanjang jalan Waru sampai Buduran. Masyarakat meyakini jika pembangunan frontage road tuntas dan beroperasi maka akan mengurangi tingkat kemacetan tersebut [14].

5. KESIMPULAN

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tersebar di Sidoarjo membuat kemacetan yang banyak meresahkan masyarakat Sidoarjo. Banyak masyarakat yang mengeluh tentang kemacetan di sekitar jalan Aloha sampai Buduran. Hal tersebut membuat Pemkab Sidoarjo membuatkan solusi dengan membangunkan frontage road untuk mengurangi kemacetan tersebut. Dan rencana pembangunan frontage road ini termasuk kedalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. Rencana pembangunan frontage road tersebut sudah lama dilakukan pada bupati sebelumnya

akan tetapi banyak kendala dari pembebasan lahan yang membuat proses pembangunan lama bahkan sampai terhenti.

Dengan banyaknya kendala yang dihadapi pada saat proses pembangunan jalan frontage tidak menyurutkan janji Gus Muhdlor-Subandi untuk terus mengejar target selesainya pembangunan jalan frontage tersebut. target selesai pembangunan adalah akhir tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Progres yang dilakukan signifikan, dari mulai menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang sudah mulai terealisasi. Pemkab mulai melanjutkan kembali pembangunan jalan frontage setelah beberapa tahun berhenti pembangunan. Gus Muhdlor-Subandi sangat memprioritaskan pembangunan jalan frontage tersebut. Karena jika frontage road sudah bisa dijalankan maka akan menjadi solusi bagi keluhan masyarakat dan untuk mengurangi kemacetan yang ada di Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewirahmadanirwati, "Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumatera Region," *J. JIPS (Jurnal Ilm. Pendidik. Scholast.*, vol. 2, no. 3, pp. 43–50, 2018, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/276792-implementasi-otonomi-daerah-dalam-mewuju-17375971.pdf>.
- [2] M. Gde *et al.*, "PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 KABUPATEN GIANYAR PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Oleh : Latar Belakang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju , khususnya," pp. 1–15, 2018, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/50594/29984>.
- [3] Sidoarjokab.bps.go.id, "Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin," *Sidoarjokab.bps.go.id*. <https://sidoarjokab.bps.go.id/indicator/12/59/1/penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.
- [4] Jatim.bps.go.id, "Jumlah Kendaraan Bermotor yang didaftarkan menurut Kabupaten/Kota dan jenis kendaraan di Provinsi Jawa Timur Unit 2018-2020," *Jatim.bps.go.id*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/07/2253/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-didaftarkan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur-unit-2018-2020.html>.
- [5] K. Akib and O. A. Tepare, "Peran pemerintah pembangunan infrastruktur jalan DI DESA MALITU KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN KABUPATEN POSO Oleh," *J. Ilm. Adm.*, vol. 8, no. 1, p. 32, 2017, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/317749-peranan-pemerintah-desa-dalam-pembanguna-90d9e94e.pdf>.
- [6] E. A. Setiani, T. Domai, and A. Wachid, "(Studi pada Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo)," vol. 2, no. 3, pp. 447–451, 2010, [Online]. Available: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/400/281>.
- [7] Y. Berlin, I. Noor, and Siswidiyanto, "KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO," vol. 3, no. 1, pp. 67–72, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/80910-ID-pelaksanaan-pembangunan-infrastruktur-pa.pdf>.
- [8] N. U. R. A. Octavia, "Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasa Syariah) Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalanporos Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perpektif Siyasa Syariah)," 2020, [Online]. Available: http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3063/1/NUR_AFNI_OCTAVIA.pdf.
- [9] V. F. Dr. Vladimir, "濟無 No Title No Title No Title," *Gastron. ecuatoriana y Tur. local.*, vol. 1, no. 69, pp. 5–24, 1967.
- [10] N. Yalina, A. P. Kartika, and A. T. R. C. Yudha, "Impact Analysis of Digital Divide on Food Security and Poverty in Indonesiain 2015-2017," *J. Manaj. Teknol.*, vol. 19, no. 2, pp. 145–158, 2020, doi: 10.12695/jmt.2020.19.2.3.
- [11] S. Literatur, P. Destinasi, and W. Labuan, "Journals of Economics Development Issues (JEDI) Eksplorasi Sumber Daya Alam Dan Ketahaan Ekonomi Lokal," vol. 5, no. 1, pp. 549–560, 2022.

- [12] Provinsi Jawa Timur, *RPJMD Prov. Jatim 2019 - 2024.pdf*. 2019.
- [13] M. Ismail, “Pembangunan Frontage Road Waru-Buduran Segera Dilanjutkan,” *Beritajati.com*, 2021. .
- [14] Sidoarjo.kab.go.id, “Proyek frontage road Aloha tembus Lingkar Timur mulai digarap Juli Gus Muhdlor tahun depan sudah bisa dipakai,” *Sidoarjo.kab.go.id*, 2022. .